

MASALAH UPAH DI JAWA: DARI SRIHARJO TAHUN 1960-AN KE TANGERANG TAHUN 1990-AN*

Chris Manning**

Abstract

The results of the PJPI reject the findings of earlier researches about the concept of disguised unemployment. In the context of the carrying capacity of the natural resources of a place compared with the existing population, its relationship with poverty is no longer very strong. Srihardjo is one of the villages in the island of Java which disagrees with this concept, where by the limited supply of the agricultural land can perfectly be substituted with the labor market in the industrial sector. However, the impact of the economic structural transformation at this time has got a balance on the wage dimension in the non-agricultural sector, particularly among the industrial workers, and the workers in the informal sector. This issue has the inevitable consequence of the exploitative tendency of the employers or entrepreneurs, and lack of support for the labor unions, which places them in a weak bargaining position in efforts to have their wages raised. Chris Manning in his paper shows the impact of the economic structural transformation on the production of workers, and their level from the agricultural sector (Srihardjo) to an industrial sector (Tangerang).

Pendahuluan

Penelitian Profesor Masri Singarimbun pada tahun 1969-1970 di Desa Sriharjo, Imogiri, telah memunculkan kesadaran bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah berat di pedesaan Jawa bagi pemerintahan Orde Baru. Upah yang sangat rendah pada waktu itu merupakan salah satu tanda betapa menderitanya petani gurem untuk memenuhi kebutuhan

hidup, lebih-lebih rakyat yang tidak memiliki tanah sama sekali. Mencari makan setiap hari adalah tantangan besar bagi kebanyakan penduduk.

Banyak ekonom terkejut dan sebagian tidak percaya pada penemuan Pak Masri bersama rekannya Dr. David Penny (almarhum) dari Australia (Penny dan Singarimbun, 1973) tentang Sriharjo. Pada awalnya, hasil penelitian

* Karangan ini disiapkan untuk inenyambut masa purna bakti Profesor Masri Singarimbun di Universitas Gadjah Mada pada Juni 1996.

** Dr. Chris Manning adalah Research Fellow pada proyek Indonesia, Australian National University, Canberra.

itu dianggap terlalu membesar-besarkan penderitaan rakyat atau memilih kasus ekstrim yang tidak mewakili keadaan Jawa pada umumnya. Kebijakan makro pemerintah waktu itu baru dipuji dan ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat akan segera menetes ke bawah.

Setelah hasil survai lain muncul, lambat laun muncul kesadaran di kalangan ekonom betapa besar tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup penduduk tunakisma dan petani gurem di Jawa. Penelitian mengenai upah, kesempatan kerja dan kaitannya dengan kemiskinan di pedesaan mulai banyak dilakukan dan mendukung penemuan Sriharjo. Pembicaraan mengenai kemiskinan tidak lagi menjadi tabu di kalangan pemerintah atau cendekiawan.

Sumbangan Pak Masri --seorang antropolog yang memusatkan perhatiannya pada masalah penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan-- penting bagi pengetahuan mengenai struktur upah dan ekonomi rakyat Indonesia pada masa Orde Baru. Kasus Sriharjo ditilik kembali berkali-kali selama 25 tahun. Desa ini merupakan suatu laboratorium hidup kasus suka duka orang kecil dalam suatu *ekonomi ajaib* Asia Timur yang dipuji-puji oleh Bank Dunia.

Pak Masri tidak membatasi perhatiannya hanya kepada soal upah dan ekonomi rakyat di Sriharjo. Melalui kolomnya di majalah *Tempo*, kalangan menengah di kota yang mulai menikmati pola konsumsi baru (dan peneliti asing yang kehidupannya sering jauh lebih mapan) diingatkan terus akan kesulitan kehidupan keluarga dalam kasus nyata upah

pas-pasan dan tidak menentu, termasuk yang dialami kalangan pegawai negeri tingkat bawahan. Dia juga membimbing banyak mahasiswa dan peneliti muda di Yogyakarta untuk mempelajari kehidupan ekonomi rakyat dan masalah upah.

Dua puluh tahun setelah penelitian di Sriharjo, ekonomi Indonesia telah berubah total. Upah riil --yaitu setelah dihitung pengaruh inflasi-- telah naik lebih dari 50 persen di pedesaan. Bahkan di pusat industri baru seperti Tangerang di daerah Jabotabek kenaikannya lebih besar dari itu. Dalam konteks dunia ketiga hal ini merupakan suatu peningkatan luar biasa. Akan tetapi, yang mengherankan ialah banyak pengamat menganggap tingkat upah buruh di kantong-kantong industri jauh lebih rendah, meskipun banyak buruh berasal dari dese-desa relatif miskin di Jawa seperti Sriharjo. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak membawa perubahan yang cukup berarti bagi penduduk desa yang kemudian menjadi buruh industri.

Mengapa banyak pengamat merasa bahwa penduduk di Sriharjo dan banyak desa lain di Jawa tidak mengalami perbaikan nasib ekonomi akibat industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru? Berikut ini kami coba menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan gambaran selintas mengenai struktur dan perkembangan upah di pedesaan dan kota selama Orde Baru. Ceritanya dimulai dengan keadaan di pedesaan Jawa yang diteliti Pak Masri pada awal masa Orde Baru, disusul diskusi pengaruh bonanza minyak,

deregulasi, serta ekspor hasil industri terhadap upah dan pasar tenaga kerja.

Kedudukan Buruh pada Awal Masa Orde Baru

Dimensi pokok masalah upah dan tenaga kerja di pedesaan Jawa pada tahun-tahun awal Orde Baru cukup jelas, berkat penelitian di Desa Sriharjo pada tahun 1969-1970, disusul penelitian Benjamin White di Desa Kaliloro di daerah Kulonprogo, Yogyakarta 1972-73.* Terdapat 2 ciri utama tentang masalah upah dan tenaga kerja di pedesaan Jawa. Pertama, upah buruh tani yang sangat rendah menurut ukuran mana pun, yaitu tidak melebihi satu kilogram beras per hari. Ini berarti tidak cukup untuk makan tiga kali sehari bagi satu keluarga dengan tiga anak, lebih-lebih membeli pakaian sekolah anak ataupun memikul ongkos untuk pergi ke kota yang terdekat, meskipun jarak kota tidak lebih dari 10 sampai 15 kilometer dari desa. Kebutuhan pokok sebagian besar keluarga di desa akan terpenuhi secara minimal apabila suami-istri bekerja penuh dan anak-anak pun mendukung ekonomi orang tua.

Kedudukan ini tampak di kebanyakan rumah tangga, yang tidak memiliki tanah atau aset lainnya yang berharga. Keterlibatan anak dalam ekonomi rumah tangga merupakan suatu keharusan untuk bertahan hidup, meskipun dalam keadaan pas-pasan. Dalam praktiknya, orang tua tidak selalu dapat bekerja penuh dalam

kegiatan mana pun, betapapun kecil penghasilannya. Mereka pun beradaptasi dengan cara yang paling mengerikan menurut penelitian di Sriharjo, yaitu mengurangi makan. Dalam hal ini mereka tidak mengurangi lauk, tetapi frekuensi makan dibatasi menjadi dua kali sehari, ini pun sering dengan makanan inferior, *tiwul* atau *gaplek* dari singkong. Konsekuensinya juga mengerikan. Tingkat kematian bayi sangat tinggi. Ketidaktentuan dalam mencapai kebutuhan dasar hidup setiap hari senantiasa dihadapi oleh sebagian besar penduduk desa.

Ciri kedua ialah perbedaan penghasilan buruh secara mencolok menurut kegiatan. Pekerjaan buruh tani di sektor padi justru memberikan imbalan lebih banyak dibandingkan dengan banyak pekerjaan lain. Di Sriharjo, imbalan yang diterima dari sektor padi jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan kerja per jam sebagai buruh *nderes* kelapa. Begitu juga keadaannya di Kaliloro, yang diteliti Benjamin White, banyak penduduk menganyam bambu untuk bertahan hidup. Jadi, ciri kemiskinan tidak selalu tampak dalam bentuk jumlah orang yang menganggur dalam satu keluarga, tetapi tampak pada perbandingan antara jam kerja yang panjang dengan kontinuitas hasil yang sangat minim. Kelebihan tenaga kerja lebih ditandai dengan penghasilan dan produktivitas yang rendah daripada pengangguran tersembunyi ataupun bentuk-bentuk

* Lihat terutama Penny dan Singarimbun (1973) dan White (1976).

pengangguran lain. Para ekonom yang menitikberatkan pengangguran sebagai tantangan yang membayangi rakyat miskin justru salah dalam perumusan masalah.

Kekurangan tanah dan kepadatan penduduk yang terus bertambah di Pulau Jawa diutamakan dalam hasil penelitian Sriharjo sebagai pokok masalah. Para peneliti waktu itu sangat pesimis mencari jalan keluarnya sesuai dengan pandangan banyak pengamat pada zaman Belanda dan antropolog termasyhur Amerika, Clifford Geertz, dalam bukunya *Agricultural Involution*. Keluarga berencana modern masih belum berakar di Pulau Jawa, meskipun penduduk telah lama menerapkan metode tradisional melalui *abstinensi* atau membatasi frekuensi kumpul antara pasangan suami-istri. Transmigrasi, industrialisasi, ataupun revolusi hijau (perkenalan bibit-bibit padi) dianggap sebagai suatu penyelesaian yang tidak dapat memecahkan masalah rendahnya upah dan penghasilan pada awal pemerintahan Orde Baru.

Memang pengalaman di negara dunia ketiga lainnya tidak memberikan harapan akan ada jalan keluarnya bagi penduduk Sriharjo. Belum tampak ada kasus satu negara yang telah dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam satu generasi. Revolusi hijau belum menyebar di sektor pertanian. Banyak pengamat meramalkan masalah kekurangan makanan akan makin parah bagi penduduk di Asia. Negara-negara *singa* Asia Timur --lebih-lebih Cina-- belum muncul sebagai contoh peningkatan upah dan produktivitas buruh melalui ekspor barang manufaktur.

Revolusi Hijau dan Bonanza Minyak

Terjadi dua perubahan penting selama tahun 1970-an yang mengundang evaluasi kembali terhadap *prognosis* suram tersebut di atas mengenai masa depan penduduk desa di Jawa. Pertama, terjadi peningkatan produksi padi melalui revolusi hijau; kedua, adanya perbaikan sarana fisik dan sumber daya manusia akibat peningkatan pajak negara dari bonanza minyak.

Bagaimana pengaruh dua perubahan ini terhadap pasar tenaga kerja? Upah di luar sektor pertanian dan di kota naik cukup pesat, terutama di sektor tekstil, bangunan, dan pemerintah (Manning, 1994). Di luar dugaan, desa-desa di Jawa seperti Sriharjo yang sudah bertahun-tahun hampir tidak merasakan pengaruh dari kota mulai merasakan terbukanya kesempatan kerja di sektor informal.

Meskipun demikian, upah buruh tani --yang dianggap sebagai salah satu indikator penting bagi perubahan dasar dalam kehidupan rakyat banyak-- tidak menunjukkan kenaikan yang berarti. Penghasilan padi meningkat, tetapi tidak disertai peningkatan kesempatan kerja yang cukup besar. Malah ada kecenderungan terjadi penurunan jumlah pekerja, akibat masuknya beberapa teknologi dan sistem kerja baru, seperti sabit dan sistem *tebasan* dalam panen. *Prognosis* bagi penduduk Sriharjo tetap suram, meskipun Pak Masri melaporkan suatu perubahan penting terutama dalam prasarana fisik, pendidikan, dan keluarga berencana di Sriharjo, sebagaimana juga tampak di banyak

desa lainnya di Jawa (Singarimbun, 1976; Collier et al., 1982).

Mengapa peningkatan upah dan kesempatan kerja di kota tidak tampak menètes ke bawah dan mempengaruhi upah buruh tani? Menurut teori ekonomi, peningkatan upah yang cukup besar dalam sektor nonpertanian di kota mestinya berdampak terhadap upah di sektor pertanian. Tampaknya teori ekonomi ini tidak memperhitungkan struktur upah yang khas di pedesaan Jawa. Karena upahnya demikian rendah di berbagai pekerjaan marginal --seperti *nderes* kelapa di Sriharjo-- rupa-rupanya terjadi kenaikan penghasilan penduduk desa, tetapi proses ini terselubung apabila ditinjau dari indikator konvensional. Di sektor padi, pekerjaan dan upah tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, tetapi penghasilan buruh dan keluarganya meningkat. Lambat laun mereka mulai meninggalkan pekerjaan marginal seperti *nderes* dan memperoleh pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, misalnya di industri bangunan dan kegiatan sektor informal di kota.

Perbedaan penghasilan dalam berbagai kegiatan di desa yang ditemukan Pak Masri dan beberapa pengamat lain --yang sering diabaikan dalam tinjauan para ekonom-- merupakan kunci untuk pemahaman dinamika perubahan pasar tenaga kerja pada waktu bonanza minyak. Hal ini penting untuk memahami berita mengejutkan pada awal tahun 1980-an mengenai munculnya kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian di berbagai tempat di Jawa, suatu perkembangan yang tidak dibayangkan sepuluh tahun sebelumnya (Collier et al., 1982). Perubahan

pasar tenaga kerja memang terjadi selama periode masuknya revolusi hijau di Jawa dan bonanza minyak, tetapi ia tersembunyi. Indikator upah dan asumsi upah tunggal yang menjadi dasar dalam analisis ekonomi pasar tenaga kerja tampak kurang relevan bagi dinamika perkembangan di pedesaan pada masa itu.

Upah dan Pasar Tenaga Kerja Desa pada Periode Deregulasi

Sampai pertengahan tahun 1990-an pasar tenaga kerja di pedesaan Jawa terus berubah. Masa pascabonanza minyak merupakan periode relatif sulit bagi banyak pencari kerja baru. Kesempatan kerja tidak didukung oleh perkembangan investasi pemerintah seperti waktu bonanza minyak. Akan tetapi, mulai sekitar tahun 1990, tampak jelas upah buruh tani naik agak tajam. Menurut data Sakernas upah riil di sektor pertanian naik lebih dari 30 persen di Jawa antara 1990-1994, didukung perkembangan upah di sektor lain yang juga tinggi. Demikian juga terjadi kenaikan upah di sektor padi di semua propinsi di Jawa, baik bagi buruh laki-laki maupun perempuan (Manning, 1994).

Apa yang memotori kenaikan upah ini? Pada tahun 1993, Pak Masri kembali ke Sriharjo dan memberikan beberapa petunjuk akan perubahan yang terjadi (Singarimbun, 1993). Pasar tenaga kerja desa telah berubah banyak sejak tahun 1970-an. Banyak anak muda yang dulu sulit mencari pekerjaan di Yogyakarta --15 kilometer ke utara-- sekarang bekerja di daerah industri di Jabotabek. Tidak sedikit di antaranya bekerja di Malaysia. Sriharjo

yang semula merupakan desa relatif terpencil dalam arti ekonomi, sekarang sudah terintegrasi dengan pasar tenaga kerja yang jauh lebih luas. Meskipun ketidakpastian dalam kehidupan ekonomi tetap menjadi masalah --lebih-lebih bagi pekerja di sektor informal-- pilihan ekonomi tampak jauh lebih banyak. Informasi akan kesempatan kerja mengalir terus dari mereka yang telah bekerja jauh dari Sriharjo.

Tanda tekanan ekonomi masih terlihat. Menyekolahkan anak ke tingkat SLTA masih sulit bagi cukup banyak keluarga, dan fasilitas kesehatan serta gizi keluarga relatif miskin masih jauh dari memadai. Akan tetapi, kekurangan makan yang dirasakan banyak penduduk dua puluh tahun sebelumnya tidak lagi merupakan masalah pokok.

Pola pasar tenaga kerja baru yang terlihat di Sriharjo juga tampak di pedesaan lain (Collier et al., 1993). Pada awal tahun 1980-an, hanya penduduk desa yang tinggal dekat kota besar umumnya merasakan dampak dari terciptanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Sepuluh tahun kemudian, desa-desa yang jauh lebih terpencil daripada Sriharjo telah merasakan pengaruh tersebut. Buruh dari daerah minus seperti Wonosari dan Wonogiri tidak lagi bekerja di kota-kota hanya karena tidak ada pilihan lain di desa, meskipun upah di sektor pertanian naik lebih lambat di berbagai daerah relatif terpencil tersebut.

Migrasi untuk mendapatkan pekerjaan tidak lagi merupakan sesuatu yang hanya dialami beberapa desa melalui migrasi berantai atau *chain*

migration untuk masuk ke sektor informal. Industri padat karya di sekeliling kota-kota besar menjadi motor bagi peningkatan kesempatan kerja penduduk pedesaan. Misalnya, di kebanyakan dari 25 desa yang diteliti Collier et al. (1993) pada tahun 1992-1993 terdapat lebih dari 50 orang yang bekerja di sektor industri, sebagian besar di sekitar kota-kota besar.

Jawa yang begitu suram prospek ekonominya dua puluh tahun sebelumnya mulai mengalami suatu transisi ekonomi yang bersejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia merdeka jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian mulai menurun secara absolut di Jawa menurut data Sakernas tahun 1993-1994. Jumlah buruh tani telah menurun terus sejak 1971. Sekarang jumlah petani pun menunjukkan penurunan. Meskipun terdapat pengaruh penyempitan tanah sawah dan ladang akibat perluasan industri dan perumahan, faktor utama bagi menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian ialah terbukanya kesempatan kerja di industri, bangunan, dan angkutan. Tidak mustahil bahwa luasnya satuan usaha tani rata-rata akan mulai naik, setelah terus menyempit akibat tekanan penduduk selama abad ke-20. Proses serupa terlihat di berbagai negara Asia Timur yang telah mengalami transisi ekonomi ke arah industri. Ini merupakan suatu perombakan struktur ekonomi desa yang luar biasa dalam 30 tahun, mengingat pesimisnya para pengamat akan masa depan pedesaan Jawa, dengan penduduknya yang begitu miskin pada awal masa Orde Baru.

Keresahan Buruh dan Kenaikan Upah Minimum

Anehnya, justru pada waktu upah mulai naik muncul banyak suara yang menanyakan kemajuan yang dicapai buruh selama Orde Baru. Ada anggapan bahwa buruh semakin ketinggalan jika dibandingkan dengan golongan masyarakat lain, lebih-lebih di kantong industri seperti Tangerang. Mogok kerja --atau yang lebih halus disebut unjuk rasa-- makin sering terjadi di daerah-daerah perkembangan industri. Pemerintah pun turun tangan dengan niat keras untuk menaikkan upah minimum di semua propinsi. Upah minimum naik lebih dari seratus persen dalam beberapa tahun, mulai dari tahun 1990. Secara riil --setelah dihitung pengaruh inflasi-- upah minimum naik lebih dari lima puluh persen di semua propinsi. Kenaikan ini luar biasa tinggi menurut ukuran internasional di negara mana pun. Rama (1996) melaporkan bahwa kenaikan upah minimum di Indonesia jauh lebih tinggi daripada yang pernah dicapai di banyak negara Amerika Latin tempat serikat buruh lebih kuat.

Mengapa muncul ketidakpuasan dengan kemajuan buruh sehingga pemerintah merasa perlu turun tangan, walaupun upah mulai naik dan pekerja di sektor pertanian mulai menurun secara absolut di Jawa? Aksi mogok kerja yang makin gencar sejak tahun 1991 disebabkan banyak faktor yang tidak berhubungan langsung dengan perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Ketidakbebasan hak buruh untuk berserikat, lemahnya organisasi buruh dan campur tangan dari pihak luar dalam penyelesaian

perselisihan perburuhan kiranya semua berperanan.

Penghasilan buruh lebih tinggi dan pekerjaannya lebih terjamin di kantong-kantong industri baru dibandingkan dengan keadaan buruh tani di desa. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan di daerah Tangerang dan kantong industri lainnya menunjukkan betapa sulit kehidupan buruh industri, makan seadanya, tidur berhimpit-himpitan dan bekerja 50-60 jam seminggu atau kadangkala lebih dari itu (White et al., 1992).

Lambat laun keadaan di desa dianggap tidak lagi merupakan perbandingan yang relevan bagi buruh di pabrik karya, seperti pakaian jadi dan sepatu. Dunia penduduk kota dengan segala ketimpangannya makin lama menjadi titik referensi. Pandangan baru ini didukung oleh kegiatan aktivis buruh yang tidak melihat keadaan di desa asal, ataupun kemiskinan yang pernah dialami keluarga buruh sebagai sesuatu yang relevan untuk perjuangan hidup dalam konteks sosial-ekonomi yang jauh berbeda.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penting dalam kesimpulan berbagai pengamat mengenai manfaat terbukanya kesempatan kerja baru di sektor industri. Para ekonom melihat hubungan pasar tenaga kerja desa-kota sebagai suatu kesatuan. Pengamat lainnya lebih menitikberatkan keadilan dalam konteks sosial kota. Ditinjau dari aspek ekonomi tenaga kerja, kenaikan penghasilan buruh yang terjadi di kantong industri adalah kemajuan penting bagi kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di

pedesaan yang tidak dapat dipungkiri terlepas dari aspek politik-sosial perburuhan. Upah buruh di daerah kantong industri sangat minim bukan semata-mata karena penindasan pengusaha (ataupun negara), tetapi karena penghasilan negara memang rendah. Pendapatan di desa yang semula begitu rendah dan tidak menentu --sebagaimana terlihat dalam kasus Sriharjo-- berarti tenaga kerja yang berlimpah menekan tingkat upah di kota.

Akan tetapi, ditinjau dari hukum perburuhan atau tingkat kehidupan kelas menengah di kota (lebih-lebih para konglomerat atau konsultan asing) kehidupan buruh industri memang serba kurang. Kesimpulan serupa dapat ditarik dari perbandingan upah di Indonesia dengan di negara tetangga, seperti Malaysia atau Muangthai.

Menaikkan upah minimum adalah salah satu jalan untuk memperbaiki kehidupan buruh di kota, tetapi pendekatan ini agaknya bukanlah jalan keluar untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi, meskipun kenaikan UMR mungkin sangat taktis dari segi sosial politik. Masalah keadilan kiranya hanya dapat diatasi secara berarti dalam sistem kapitalis dengan memperluas kesempatan kerja dan mendistribusikan pendapatan dari kelompok relatif mapan dan kaya ke lapisan bawah. Hal ini dapat dicapai melalui sistem pajak, dengan mengurangi kebocoran, lebih mementing-

kan kebijakan yang meningkatkan sumber daya manusia (dalam arti luas), dan melalui kemajuan ekonomi berdasarkan industri padat karya. Upah minimum justru dapat menjadi bumerang apabila dipaksakan dengan tingkat pertumbuhan yang jauh melebihi kenaikan upah rata-rata sehingga kesempatan kerja akan berkurang.*

Untungnya, selama tahun 1990-an, Indonesia telah mengalami kenaikan upah minimum, upah rata-rata dan peningkatan kesempatan kerja yang pesat, suatu kombinasi yang jarang terjadi di negara mana pun. Kemajuan ini dianggap suatu kemenangan bagi kebijakan UMR yang dijalankan pemerintah. Namun demikian, kiranya kenaikan upah buruh tidak semata-mata terjadi karena UMR. Kelebihan tenaga kerja yang hanya dapat terserap di sektor pertanian atau sektor informal selama Orde Baru ternyata tidak lagi mendominasi pasar tenaga kerja. Perubahan mendasar ini justru terjadi pada waktu UMR digalakkan (Manning, 1996). Akibatnya, kenaikan UMR tidak mempunyai dampak negatif yang penting terhadap kesempatan kerja. Singkatnya, naiknya upah buruh lebih banyak disebabkan oleh keberhasilan strategi ekspor industri ketimbang kebijakan UMR --meskipun yang terakhir ini mungkin juga ada pengaruhnya-- terutama di perusahaan yang memberikan imbalan jauh di bawah tingkat upah rata-rata.

* Inilah ramalan Rama (1996) terutama bagi industri kecil dan menengah, apabila UMR dinaikkan dengan cukup drastis dan kebijakan ini memang dilaksanakan di sektor tersebut.

Penduduk desa seperti warga Sriharjo, jelaslah kiranya merasakan manfaat dari perkembangan industri ekspor. Agaknya, tidak dapat dibayangkan tiga puluh tahun yang lalu bahwa perkembangan industri ekspor yang terpusat di sekitar Jakarta, Bandung, dan Surabaya bisa mempunyai pengaruh yang sedemikian besar di desa-desa seperti Sriharjo, yang pada waktu itu relatif terpencil. Pada tahun 1990-an pasar tenaga kerja mulai terintegrasi di Jawa. Pengaruh pembangunan ekonomi terasa di desa-desa jauh dari pusat-pusat ekonomi. Usaha-usaha untuk memerangi biaya ekonomi tinggi juga mempunyai dampak sampai ke desa karena pengaruhnya yang luas terhadap pasar tenaga kerja dan barang.

Peningkatan kesempatan kerja di sektor industri dan sektor terkait merupakan perkembangan yang penting dalam internasionalisasi sistem ekonomi di Jawa, sejak jatuhnya industri tebu pada resesi dunia tahun 1930-an. Pengaruh internasionalisasi pada masa ini tidak lagi bergantung pada harga barang primer seperti tebu dan karet, yang harganya bisa mendadak *anjlog*, dan menunjukkan *trend* menurun dibandingkan dengan harga barang industri sejak tahun 1950-an. Perbedaan lainnya ialah mengalirnya hasil industri terutama ke negara maju telah mengundang kritik dari luar mengenai syarat-syarat kerja,

lingkungan hidup, dan sebagainya di Indonesia.*

Kesimpulan

Mungkin seorang pengamat dari luar yang telah membaca hasil penelitian Pak Masri dan David Penny akan terkejut apabila dia masuk ke Desa Sriharjo untuk pertama kali pada tahun 1996. Selain perbaikan prasarana fisik dan sosial, mobilitas penduduk yang tinggi serta diversifikasi pekerjaan merupakan dua perubahan yang mencolok. Kekurangan tanah dan kelebihan tenaga kerja merupakan dua masalah mendasar pada awal masa Orde Baru. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an kekurangan tanah tidak lagi menjadi masalah utama karena sudah terjadi diversifikasi pekerjaan di luar sektor pertanian dan di luar desa.

Dengan demikian, konsep kelebihan tenaga kerja --dalam arti jumlah penduduk menurut sumber alam yang tersedia-- tidak lagi erat hubungannya dengan kemiskinan. Masalah-masalah yang dihadapi rakyat desa sudah berbeda. Masalah ini lebih menyangkut sumber daya manusia, kesempatan kerja yang relatif stabil, dan imbalan yang cukup di luar sektor pertanian. Seperti diuraikan Pak Masri pada tahun 1993, kebanyakan penduduk yang tinggal Sriharjo masih menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat, tetapi dimensinya lain jika dibanding-

* Ini jelas terlihat dalam kasus ancaman pencabutan akses Indonesia ke tarif impor khusus, di pasaran Amerika di bawah program GSP (*Generalised Sistem of Preferences*) pada tahun 1993-1994.

kan dengan tahun-tahun pertama masa Orde Baru.

Dimensi masalah upah juga tidak sama pada tahun 1990-an. Kegiatan anyam-anyaman atau industri gula kelapa dengan penghasilan per jam kerja yang sangat rendah masih ada di desa-desa seperti Sriharjo dan Kaliloro. Akan tetapi, hal ini tidak lagi merupakan sumber penghasilan utama penduduk. Pekerjaan upahan di luar desa menggantikannya di banyak desa. Perjuangan untuk dapat menyambung hidup diteruskan dalam lingkungan yang jauh berbeda di tengah hiruk-pikuk industri di daerah seperti Tangerang. Dari segi penghasilan absolut, penghasilan buruh jauh lebih tinggi di tempat kerja baru. Alhasil banyak penduduk yang bekerja di sektor industri di kota. Perbandingan antara kesempatan kerja dan persediaan tenaga kerja lebih berimbang. Kiriman dari kota sering --namun tidak selalu-- dapat mendukung kehidupan ekonomi bagi keluarga yang ditinggal.

Akan tetapi, secara relatif keadaan buruh tidak lebih baik apabila ditinjau dari kaca mata orang kota. Banyaknya orang yang hidup relatif mapan di kota besar dapat menyebabkan buruh merasa serba kurang.

Jadi, perjuangan untuk mengatasi kemiskinan absolut yang menyangkut kekurangan makan agaknya telah berlalu bagi banyak penduduk di pedesaan Jawa. Berkat penelitian Pak Masri dan peneliti lainnya, dimensi pokok masalah ini diketahui pada awal masa Orde Baru. Kebijakan pembangunan pertanian, prasarana dan sumber daya manusia mula-mula besar pengaruhnya dalam menghadapi

masalah kemiskinan absolut di desa seperti Sriharjo.

Pada tahun 1990-an, arus penduduk ke luar desa menjadi dinamika perubahan yang tidak kalah pentingnya. Jelas ada kemajuan ekonomi bagi warga desa, baik yang tinggal di dalam desa maupun yang bekerja di luarnya. Namun, bagi mereka yang tinggal di kota, kemajuannya lebih sulit diukur. Buruh industri atau pekerja sektor informal merupakan lapisan bawah di kota. Buruh sering dieksploitasi pengusaha dalam berbagai syarat kerja. Pada umumnya mereka tidak mempunyai dukungan yang berarti dari serikat buruh. Jadi, meskipun keadaan ekonomi buruh lebih baik di kota daripada di desa asal, masih terdapat banyak ketimpangan dibandingkan dengan syarat-syarat kerja internasional --yang makin banyak ditonjolkan sebagai patokan-- ataupun dibandingkan dengan kesejahteraan banyak penduduk kota lainnya.

Kedua perspektif, yang berlawanan mengenai kemajuan --atau kemunduran-- keadaan ekonomi buruh sehubungan dengan perkembangan industri ini kiranya patut dipertimbangkan dalam penyusunan suatu strategi bagi perbaikan nasib buruh. Yang banyak diekspos di media massa dan *action program* adalah masalah yang dihadapi buruh dari perspektif kota. Agaknya, tingkat kehidupan pedesaan dan dinamika perubahan kesejahteraan di desa-asal para buruh patut lebih banyak dipelajari agar program-program tersebut berkaitan dengan kenyataan lingkungan sosial-ekonomi keluarga buruh. Penelitian Pak Masri di Sriharjo sangat berharga dalam konteks

ini. Penelitian ini merupakan salah satu sumber yang kaya akan informasi mengenai perubahan keadaan sosial

ekonomi serta pasar tenaga kerja dan upah di pedesaan Jawa selama 25 tahun pada zaman Orde Baru.

Referensi

- Collier, W. et al. 1982. "Acceleration of Rural Development in Java", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 18(3): 84-101.
- Collier, W. et al. 1993. *A new approach to rural development in Java: twenty five years of village studies*, Jakarta: Unpublished paper.
- Manning, Chris. 1994. "What has happened to wages in the new order?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 30(3): 73-114.
- , 1996. Labour market transformation in Indonesia: the halting steps of an East Asian Giant. Canberra: Australian National University. Unpublished manuscript.
- Penny, D. and Masri Singarimbun. 1973. *Population and poverty in rural Java: some economic arithmetic from Sriharjo*. Ithaca: Cornell University.
- Rama, M. 1996. The consequences of doubling the minimum wage: the case of Indonesia. Washington: World Bank. unpublished paper.
- Singarimbun, Masri. 1976. "Sriharjo revisited", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 12(2): 117-25.
- , 1993. "The opening of a village labour market: changes in employment and welfare in Sriharjo", dalam Chris Manning and J. Hardjono, eds., *Indonesia assessment 1993 labour: sharing in the benefits of growth?*. Canberra: Department of Political and Social Change, Research School of Pacific Studies, The Australian National University.
- White, Benjamin. 1976. "Population, employment and involution in a Javanese village", *Development and Change*, 7, 267-90.
- , 1979. "Political aspects of poverty, income distribution and their measurement: some examples from rural Java", *Development and Change*, 10(1): 91-114.
- White, Benjamin. et al. 1992. "Workshops and factories: dynamics of production organisation and employment in West Java's: rural footwear industries". Paper presented at the 9th Biennial Conference of the Asian Studies Association, July 6-9 1992.